

## ABSTRAK

Tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang). Dalam menanggulangi **tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dengan study kasus normalisasi kali bebeng di Kabupaten Magelang**. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini? 2) Hambatan apa yang terjadi pada implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ? 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini. 2) Mengetahui hambatan apa yang terjadi pada implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3) Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Kebijakan pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini di muat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dirumuskan BAB XXIII Ketentuan Pidana (*penal provisions*) Pasal 158-165 dalam Undang-Undang Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Minerba mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. 2) Hambatan yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. a. Batasan luasan minimal wilayah eksplorasi, b. Kewajiban Divestasi Setelah 5 (Lima) Tahun Operasi Produksi, c. Regulasi tidak bersifat netral terhadap persaingan usaha. Kewenangan pemerintah untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. d. Prioritas kepada BUMN dan BUMD, Kewajiban menggunakan perusahaan lokal dan/atau nasional, dan larangan menggunakan perusahaan afiliasi. e. Batasan Wilayah wilayah maksimal operasi pertambangan. 3) Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan solusinya adalah kebijakan pemedanaan pertambangan Mineral dan Batubara pun harus mengedepankan aspek nonpenal, melalui pembinaan dan pengawasan.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara**

## ABSTRACT

Thesis entitled Criminal Law Policy Against Minerals and Coal Mining Case (Case Study of Normalization of Kali Bebeng Magelang Regency). In tackling the criminal act of mineral mining and coal with case study of normalization times bebeng in Magelang regency. Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) What is the criminal law policy towards the criminal act of mineral mining and coal in the current positive law? 2) What are the obstacles to Implementation of Law Number 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining? 3) What is the criminal law policy towards the criminal act of mineral mining and coal and what is the solution

The research objectives in this research are: 1) To know the criminal law policy toward mineral and coal mining crime in positive law at this time. 2) To know what obstacles to Implementation of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining. 3) To know the criminal law policy toward mineral and coal mining crime and what is the solution.

The result of the research concludes that: 1) The crime policy on criminal offenses in the field of mineral and coal mining is currently loaded in Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. With formulated CHAPTER XXIII Penal provisions Article 158-165 in Minerba Act is a form of implementation of this formulation phase is seen as a very important stage in the process of crime prevention by penal means. However, the results of research indicate that the stipulation stage of criminal law in the Minerba Act fails, in the sense that the criminal provisions in the law can not give a clear direction to the authorized body at the stage of criminalization and also for the implementing agency authorized at the stage of criminal execution . How not to say so, because there are many weaknesses in the regulated criminal provisions. 2) Barriers that occur in the implementation of Law Number 4 Year 2009. a. Limitation of minimum area of exploration, b. Divestment Obligation After 5 (Five) Years of Production Operation, c. Regulation is not neutral to the competition of the business. The government's authority to determine the production amount of each commodity per year per province. d. Priority to BUMN and BUMD, Obligation to use local and / or national companies, and prohibition of using affiliated companies. e. Limits The territory of a maximum area of mining operations. 3) Criminal Law Policy on mineral and coal mining crime and its solution is the policy of mineral mining and coal mining must also prioritize nonpenal aspect, through coaching and supervision.

**Keywords: Criminal Law Policy, Minerals and Coal Mining Crime**